

## Sebuah pemikiran perlawanan Chudori terhadap cengkeraman kekuasaan dalam *Laut Bercerita*

*Chudori's ideology of counter-hegemony in "Laut Bercerita"*

Michael Kevin Bryan Sahertian<sup>1,\*</sup>, Eta Farmacelia Nurulhady<sup>2</sup>, Muhammad Suryadi<sup>3</sup>, & Fadila Rana Laluna<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>1,\*</sup>Email: [kobejakop@gmail.com](mailto:kobejakop@gmail.com); Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-3914-2570>

<sup>2</sup>Email: [farmacelia@gmail.com](mailto:farmacelia@gmail.com); Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0001-6178-3294>

<sup>3</sup>Email: [mssuryadi07@gmail.com](mailto:mssuryadi07@gmail.com); Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-5275-4037>

<sup>4</sup>Email: [hereislaluna@gmail.com](mailto:hereislaluna@gmail.com); Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0008-3164-7866>

### Article History

Received 16 April 2024

Revised 17 May 2024

Accepted 21 May 2024

Published 4 June 2024

### Keywords

ideology; oppressive; domination; resistance; marxism.

### Kata Kunci

ideologi; opresif; dominasi; resistensi; marxisme.

### Read online

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.



### Abstract

This study aims to prove the ideology of resistance of Leila Salikha Chudori towards oppressive force via *Laut Bercerita*. Literary work is a product of the author's critical thinking; therefore, it is important to understand Chudori's ideology in her work. From a Marxist point of view, there is a battle for domination in every society. This study tries to understand where is the ideological position of Chudori in the battle for domination. The method used to conduct this research is qualitative descriptive. Research on *Laut Bercerita* was a literature study that uses a Marxist approach. Theories that will be used are Antonio Gramsci's Theory of Hegemony and Louis Althusser's Theory of State Apparatus. The study concludes that Chudori is a figure of resistance in a battle for domination, which means Chudori's ideological position belongs to the group that refuses to be dominated.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pembuktian atas ideologi resistensi Leila Salikha Chudori terhadap kekuatan opresif yang dapat ditemukan dalam *Laut Bercerita*. Sebuah karya sastra adalah produk dari pemikiran kritis penulisnya; maka, penting rasanya untuk memahami ideologi dari Chudori yang tercermin dari karyanya. Sudut pandang Marxisme menilai bahwa selalu ada sebuah pertarungan untuk memperebutkan dominasi dalam setiap masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan pemahaman terkait posisi Chudori secara ideologis dalam pertarungan dominasi. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian terhadap *Laut Bercerita* merupakan studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan Marxisme. Beberapa teori yang akan digunakan untuk menjadi pisau untuk membedah *Laut Bercerita* adalah teori hegemoni Antonio Gramsci dan teori *state apparatus* Louis Althusser. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa Chudori adalah seorang figur resistensi dalam sebuah pertarungan dominasi, yang berarti posisi ideologis Chudori berada di sisi kelompok yang menolak untuk didominasi.

© 2024 The Author(s). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* by Universitas Mulawarman

### How to cite this article with APA style 7th ed.

Sahertian, M. K. B., Nurulhady, E. F., Suryadi, M., & Laluna, F. R. (2024). Sebuah pemikiran perlawanan Chudori terhadap cengkeraman kekuasaan dalam *Laut Bercerita*. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 7(2), 335—346. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v7i2.969>



## A. Pendahuluan

Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah Presiden Soeharto. Sepanjang kepemimpinan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Soeharto dikenal sebagai pemimpin atas rezim yang militeristik dan otoriter (Ashri & Syahwal, 2023). Sejarah mencatat, tidak kurang dari tiga dekade hegemoni atau dominasi kekuasaan Soeharto tidak tergantikan. Dengan bantuan instrumen represif maupun ideologis yang ada di bawah kendalinya, Soeharto mempertahankan hegemoni atas Indonesia.

Instrumen kontrol sosial yang paling utama adalah ideologi (Flynn, 2021). Dengan memiliki kontrol atas pemikiran masyarakat, selama kurang lebih tiga dekade masyarakat tunduk dan tidak memberikan perlawanan berarti terhadap kekuasaan. Chrisolm dalam Flynn (2021) menyatakan bahwa untuk melakukan kontra-hegemoni atau melawan dominasi kekuasaan dibutuhkan edukasi terhadap masyarakat. Masyarakat hanya dapat melakukan perlawanan apabila sudah lepas dari kontrol ideologis yang dilakukan oleh penguasa.

Solihutaufa (2022) menemukan bahwa perlawanan yang berarti terhadap Orde Baru tidak pernah terjadi sebelum tahun 1998 karena masyarakat dikalahkan dalam pertarungan ideologis. Siapa pun yang tidak ada di pihak pemerintah akan mendapatkan diskriminasi dan kriminalisasi. Pemerintah menebar rasa takut dengan melabeli masyarakat kritis sebagai penjahat yang mengganggu keamanan negara (Solihutaufa, 2022). Atas nama keamanan dan stabilitas negara, pemerintah mendapatkan legitimasi atas tindakan represif yang dilakukan. Salah satu pertarungan ideologis yang pernah terjadi adalah propaganda *Back to Campus* di tahun 1970-an ketika pemerintah memaksa mahasiswa untuk sekedar menjadi elite intelektual bukan elite politik (Widyanti et al., 2023). Pemerintah melarang adanya perbincangan atau diskusi mengenai politik. Rajab (2022) menyatakan bahwa partai politik, media massa, maupun organisasi harus memainkan peranan sebagai instrumen penopang tiga pilar politik Orde Baru, yaitu presiden, angkatan bersenjata, dan birokrasi. Diskusi mahasiswa dilarang karena dapat menghasilkan oposisi ideologis terhadap pemerintahan Orde Baru. Perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru dipicu oleh krisis moneter tahun 1997. Rupiah yang melemah terhadap dolar menyebabkan harga bahan pokok yang naik secara signifikan. Pada tahap ini, mahasiswa memainkan peran menjadi aktor intelektual yang menjadi pelopor perlawanan di tahun 1998. Mahasiswa dibantu oleh aktivis dan diamplifikasi oleh media massa bahu-membahu menyadarkan masyarakat bahwa mereka selama ini kalah dalam kontestasi ideologi, harus bangkit dan melawan (Widyanti et al., 2023).

Tumbanganya Soeharto adalah tanda bahwa masyarakat telah memenangkan pertarungan ideologi. Masyarakat tidak lagi takut untuk melawan doktrin dan propaganda yang dibuat oleh Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan Orde Baru yang meredam suara masyarakat dengan kekerasan akhirnya berakhir (Farchan, 2022). Masyarakat yang merasakan hidup di bawah kepemimpinan Soeharto sangat menantikan demokrasi yang benar pasca turunnya presiden ke-2 tersebut. Kurang dari tiga dekade setelah perjuangan tahun 1998 yang memakan korban jiwa, muncul romantisasi terhadap pemerintahan Indonesia di bawah Soeharto. Banyak kelompok yang menginginkan keamanan daripada kebebasan. Penelitian ini dibangun dengan maksud menyeimbangkan diskusi yang terjadi di dalam masyarakat. Melalui pemahaman akan pengalaman hidup dalam hegemoni yang mengorbankan kebebasan dan kemerdekaan manusia demi keamanan yang hanya bersifat ilusif, diharapkan masyarakat dapat membangkitkan perlawanan melalui gerakan kontra-hegemoni (Flynn, 2021).

Leila Salikha Chudori adalah satu dari sekian individu yang terlibat dalam diskusi mengenai Orde Baru. Dalam wawancara dengan kanal Youtube *Menjadi Manusia*, Chudori (2020) menyampaikan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dengan membiarkan pemerintahan Indonesia dijalankan dengan cara otoriter. Kalimat Chudori relevan karena profesinya sebagai wartawan senior di zaman pemerintahan Soeharto. Chudori berperan aktif dalam menceritakan kembali pentingnya demokrasi. Tulisan, wawancara, maupun aksi Kamisan terus menerus ia lakukan untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan belenggu pemerintahan Orde Baru (Chudori, 2020).

Chudori adalah penulis relevan untuk membicarakan mengenai Orde Baru secara umum, khususnya di tahun 1998. Chudori mengalami kerusuhan yang ada di sekitar Kawasan Segitiga Emas DKI Jakarta. Anarki massal yang berujung kepada kerusuhan dimulai dari demonstrasi yang tidak dapat dibendung (Iryana & Mustofa, 2023). Kerusuhan ini dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap militer (Bird, 1999). Chudori (2020) berujar bahwa anaknya sampai dengan hari ini mengalami trauma yang disebabkan oleh melihat kekerasan di usia yang sangat muda.

Trauma lebih sukar disembuhkan daripada luka fisik karena ingatan terhadap sebuah trauma akan sama menyakitkannya seperti trauma itu sendiri. Trauma apalagi dengan skala nasional tidak dengan mudah disembuhkan karena tersimpan oleh memori kolektif (Eyerman, 2003). Pengalaman buruk di masa lalu akan menimbulkan trauma di kemudian hari (Adi & Bahri, 2023). Penjelasan di atas dapat menunjukkan

bagaimana masyarakat yang pernah hidup di zaman Orde Baru apalagi korban dari tragedi 1998 tidak akan mudah melupakan trauma yang ditimbulkan oleh rezim otoriter.

Kesaksian dari sumber utama, yaitu masyarakat sipil dibutuhkan untuk menguak peristiwa yang tabu (Himawan et al., 2022). Dengan tulisan dan kesaksiannya, Chudori ingin menunjukkan bahwa ada trauma tak selesai yang dialami oleh korban tragedi 1998. Ia menentang adanya pemerintahan otoriter dengan tumpuan kekuatan militer (Chudori, 2020). Nugroho et al. (2022) menyatakan bahwa demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh berbagai lapisan masyarakat harus dipertahankan dengan segenap kekuatan. Partisipasi Chudori di setiap Kamisan adalah salah satu bukti bahwa ia merupakan aktor intelektual yang berpihak kepada *subaltern forces* atau kelompok tertindas (Rahmadhani & Wardana, 2023).

Tinjauan pustaka untuk penelitian ini adalah tulisan dari Furqan et al. (2023) yang memiliki fokus penelitian pada trauma yang dialami oleh keluarga dari korban yang dihilangkan dengan paksa dalam novel *Laut Bercerita*. Penelitian ini didasarkan oleh pendapat Hirsch dalam bukunya *The Generation of Post Memory*. Hirsch menjelaskan bahwa sebuah trauma akan tindakan kekerasan dapat diwariskan kepada orang yang tidak mengalami tindakan tersebut. Trauma yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan dapat ditemukan melalui bagaimana karakter Ayah, Ibu dan Asmara Jati menghadapi kematian Biru Laut. Selanjutnya, Andani et al. (2022) melakukan kritik terhadap pihak berwajib dan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pemerintah yang memakai kekuasaan dengan sewenang-wenang. Masyarakat yang malas berbenah diri adalah alasan terjadinya hegemoni (Andani et al., 2022). Terakhir, Rahmi (2021) menggunakan bantuan analisis wacana kritis untuk mengkaji berbagai macam bentuk ketimpangan sosial. Hasil penelitian Rahmi ditemukan tiga jenis kekerasan, yaitu fisik, verbal, dan birokratis.

Tinjauan pustaka terhadap penelitian yang lebih dahulu terbit memiliki fokus terhadap karya sastra itu sendiri. Kebaruan dari penelitian ini adalah fokus utamanya yang berupa ideologi dari penulis. Penelitian ini mencoba menemukan posisi ideologis kontra-hegemoni dari Chudori lewat kutipan dalam novel dan wawancara. Chudori (2020) menyatakan dalam wawancara dengan kanal Youtube *Menjadi Manusia* bahwa ia menentang rezim otoriter dan dominasi kekuasaan.

Penelitian terhadap *Laut Bercerita* karya Chudori akan menggunakan pendekatan Marxisme. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konflik antar kelas dalam masyarakat yang didasari oleh dominasi penguasa dengan penindasan terhadap kelompok marginal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep hegemoni, strategi yang digunakan oleh kelas dominan dalam mempertahankan kekuasaan, serta upaya yang dilakukan oleh kelas yang terdominasi untuk melawan hegemoni tersebut. Dengan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang teori Marxisme, penelitian ini berharap dapat memperkuat asumsi mengenai ideologi kontra-hegemoni yang terdapat dalam karya sastra *Laut Bercerita* karya Chudori.

Pendapat dari tokoh Marxisme terkenal, seperti Antonio Gramsci dan Louis Althusser, digunakan untuk menganalisis novel karya Chudori. Teori Hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci dan teori *State Apparatus* yang dikemukakan oleh Louis Althusser akan digunakan dan diperbincangkan secara saling melengkapi dalam bagian pembahasan. Teori Hegemoni membahas tentang bagaimana penindasan terhadap kelompok yang lebih lemah dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui penggunaan kekerasan dan kepemimpinan intelektual (Gramsci, 1992). Sementara itu, teori *State Apparatus* mengungkapkan dua instrumen yang digunakan untuk mencapai dominasi, yaitu *Repressive State Apparatus* yang menggunakan kekerasan dan *Ideological State Apparatus* yang merupakan alat ideologis dalam mempertahankan dominasi (Althusser, 1971).

## B. Metode

Penelitian ini merupakan sebuah kajian tekstual metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif memiliki fokus terhadap penjelasan fenomena sosial (Hancock et al., 2009). Metode deskriptif kualitatif dipilih sebagai cara untuk menyampaikan analisis terhadap fenomena sosial yang berupa praktik hegemoni penguasa terhadap rakyat juga praktik kontra-hegemoni masyarakat untuk melawan dominasi kekuasaan. Sumber data utama dari penelitian ini adalah *Laut Bercerita* (2017). Sumber lain yang dijadikan rujukan adalah wawancara Chudori (2020) dan Patria (2020) yang dipublikasikan oleh kanal media digital *Menjadi Manusia* dalam platform Youtube.

Langkah kerja dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah membaca dan mencatat. Sumber data utama yang digunakan adalah novel *Laut Bercerita* karya Chudori, yang dibaca berulang-ulang untuk memperoleh pemahaman yang konkret. Selanjutnya, data tambahan dari artikel jurnal, buku, dan wawancara juga dicatat sebagai referensi. Setelah tahap pengumpulan data selesai, dilanjutkan dengan tahap analisis. Pada tahap ini, teori Hegemoni

Gramsci dan teori *State Apparatus* Althusser dikaitkan dengan novel *Laut Bercerita*. Fakta-fakta sejarah yang ditemukan mengenai dominasi kekuasaan pada era Orde Baru juga digunakan sebagai benang merah yang menghubungkan sastra dengan realitas yang ada. Terakhir, data mengenai latar belakang penulis sebagai seorang jurnalis juga ditambahkan melalui wawancara sebagai narasumber untuk menyimpulkan ideologi penulis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Langkah-langkah analisis tekstual dalam perspektif Marxisme meliputi analisis terhadap kelas sosial penulis. Penelitian ini akan mengamati penulis melalui karya sastra yang dihasilkannya. Selanjutnya, akan melihat sejarah atau budaya yang tercermin dalam teks pada saat karya sastra tersebut dibuat. Terakhir, akan dilakukan pembuktian apakah latar belakang sejarah tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada saat itu. Dalam penelitian ini, pendekatan tekstual yang digabungkan dengan pendekatan Marxisme digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap makna tersirat dalam teks karya sastra.

### C. Pembahasan

Pendekatan Marxisme dalam menelaah karya sastra berarti melihat sastra dengan sudut pandang Marxisme. Marxisme memiliki premis sederhana bahwasanya di dalam sebuah masyarakat terdapat konflik antar kelas untuk memperebutkan kekuasaan (Marx, 1904). Gramsci (1992) menyatakan bahwa sebuah hegemoni dapat terjadi apabila sebuah kelompok menindas kelompok lain lewat kekerasan dan penjajahan ideologis. Althusser (1971) berujar bahwa penguasa menggunakan peralatan baik instrumen kekerasan maupun instrumen ideologis untuk memastikan kesinambungan kekuasaan yang tak terbantahkan.

Instrumen kekerasan disebut dengan *Repressive State Apparatus* (RSA). Instrumen ini akan menjalankan fungsinya dengan menggunakan kekerasan. Siapa pun yang tidak patuh atau bahkan melawan penguasa akan berhadapan dengan RSA milik penguasa. Militer, polisi, penjara, dan pengadilan adalah contoh instrumen yang berfungsi dengan keras untuk mengatur tingkah laku masyarakat (Althusser, 1971). Konsekuensi kekerasan dan hukuman akan dihadapi oleh siapa pun yang tidak mematuhi instrumen ini. Instrumen lainnya di bawah kendali penguasa adalah *Ideological State Apparatus* (ISA). Instrumen ini dikenal dengan sebutan instrumen ideologis karena instrumen ini menjalankan fungsinya melalui pemikiran seseorang. Agama, keluarga, edukasi, politik, sarana komunikasi massal, kultur adalah contoh instrumen yang berfungsi tanpa adanya kekerasan untuk mengatur tingkah laku masyarakat (Althusser, 1971). Instrumen ideologis berfungsi untuk mengatur dengan cara yang lebih halus dan tanpa adanya kekerasan. RSA dan ISA akan dipakai secara berkesinambungan untuk mempertahankan kekuasaan dalam jangka waktu lama. Tindakan dan perilaku masyarakat akan diatur dengan ketat melalui penerapan hukum yang ditegakkan oleh kekuatan militer (Ashri & Syahwal, 2023). Pola pikir masyarakat akan dipengaruhi oleh propaganda yang disebarkan melalui media massa atau pers (Suwirta, 2018). Selain melalui komunikasi massal, ISA bisa disebarkan melalui doktrin yang diberikan dalam edukasi.

Gramsci (1992) menemukan *risorgimento* atau hegemoni akan dilakukan penguasa terhadap *subaltern classes* atau kelompok marginal akan berujung pada resistensi bahkan perlawanan yang disebut kontra-hegemoni. Hegemoni dan kontra-hegemoni sejatinya adalah proses negosiasi, persetujuan maupun resistensi antara penguasa dengan kelompok yang dikuasai (Cere, 2016). Gramsci (1992) menyatakan bahwa *organic intellectual* atau aktor intelektual organik akan hadir dari masyarakat yang tertindas dan melawan ISA atau propaganda penguasa untuk kemudian bersama-sama melawan RSA untuk melakukan perlawanan atas hegemoni penguasa.

#### 1. Hegemoni Orde Baru

Orde Baru dalam *Laut Bercerita* menggunakan RSA untuk melakukan penangkapan terhadap tiga aktivis Yogyakarta di tahun 1988. Hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan di bawah ini.

Peristiwa penangkapan tiga aktivis Yogyakarta tiga tahun sebelumnya masih saja terasa panas dan menghantui kami (Chudori, 2017, p. 12).

Faktanya, Orde Baru adalah salah satu rezim yang sangat keras dan otoriter terhadap siapa pun yang mengancam (Cribb, 2010). Farchan (2022) menemukan bahwa penerapan UU Antisubversi (UU Nomor 5/1969) menjadi legitimasi atas tindakan represif pemerintah untuk mengontrol masyarakat terutama mereka yang kritis. Pasal “karet” yang berarti luas dan lentur membuat banyak aktivis dicap subversif tergantung dengan interpretasi dari pengadilan. Dengan ini dapat dipastikan bahwa hukum adalah RSA yang digunakan Orde Baru untuk secara legal membungkam dan menangkap oposisi.

Soeharto memiliki kekuatan yang mutlak terhadap NKRI. Soeharto menggunakan Undang-Undang untuk memperkuat dirinya sendiri (Hara, 2001). Hukum dibuat bukan untuk mengatur pemerintahan namun untuk memastikan bahwa Soeharto dan kroninya selalu berada di pucuk kekuasaan. Soeharto dan keluarganya memiliki pengaruh yang besar dalam pembuatan kebijakan yang menguntungkan kerajaan bisnis mereka (Liddle & Mallarangeng, 1997). Orde Baru adalah rezim yang memiliki hegemoni tak terbantahkan (Nordholt, 2003). Kekuatan mutlak inilah yang membuat Orde Baru serasa tak terkalahkan.

Orde Baru dalam hal ini penguasa bersama kelas menengah dan kelas atas dalam *Laut Bercerita* adalah kelas dominan yang menindas kelas *subaltern*. Hal ini dicerminkan dari kutipan berikut.

Sebagai seorang mahasiswa hijau, apa yang bisa kita lakukan untuk mengguncang sebuah rezim yang begitu kokoh berdiri selama puluhan tahun, dengan fondasi militer yang sangat kuat dan ditopang dukungan kelas menengah dan kelas atas yang nyaman dengan berbagai lisensi dan keistimewaan yang dikurcurkan oleh Orde Baru? (Chudori, 2017, p. 23).

Selama tiga dekade, Indonesia berada dalam hegemoni Soeharto dan kroni. Hegemoni adalah ketika kelas yang berkuasa mempertahankan kuasanya dengan kesadaran dari kelas yang dikuasai (Flynn, 2021). Masyarakat dikuasai dengan ideologi yang membuat masyarakat menyadari hal yang salah. Hal ini disebut *false consciousness*, saat di mana masyarakat menyadari bahwa ia memiliki keamanan, tetapi tidak menyadari bahwa kebebasannya telah dirampok oleh penguasa. Ini adalah salah satu cara penguasa melanggengkan kekuasaan, mengawetkan sebuah hegemoni.

Sayap Golkar atau kaderisasi partai politik adalah sarana negosiasi dari penguasa untuk menarik oposisi ke sisi mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari kutipan berikut.

“Mbok energi yang kelebihan itu disalurkan pada organisasi yang genah, seperti sayap Golkar gitu lo, Dik” (Chudori, 2017, p. 26).

Kelanggengan kekuasaan Soeharto tak lepas dari sistem hegemoni partai Golkar. Soeharto membuat sistem politik yang bisa ia kendalikan (Suryadinata, 2007). Golkar memiliki strategi yang unik dimana setiap Pegawai Negeri harus bersumpah setia terhadap Partai Golkar. Orde Baru memiliki doktrin bahwa militer adalah pemersatu, pengayom dan juru selamat negara dari Belanda, pemberontak Muslim, Separatis dan Komunis (Liddle, 1985). Penerimaan masyarakat terhadap doktrin militer adalah salah satu alasan Soeharto bisa melakukan hegemoni.

Propaganda *Bersih Diri Bersih Lingkungan* adalah doktrin ideologis yang menyasar hingga institusi pendidikan dalam *Laut Bercerita*. Hegemoni Orde Baru lewat ISA ini dapat dilihat dari kutipan berikut.

Bersih Diri dan Bersih Lingkungan diterapkan di seluruh Indonesia. Siapa saja yang orangtua atau keluarganya pernah menjadi tahanan politik yang berkaitan dengan Peristiwa 1965 tak diperkenankan bekerja yang berhubungan dengan publik (Chudori, 2017, p. 30).

Faktanya, Orde Baru lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 mengatur tentang perlakuan eks tahanan politik. Guru/dosen dan pemuka agama dianggap sebagai profesi yang dapat mempengaruhi orang lain (Cribb, 2010). Dengan dalil dapat menimbulkan permasalahan dalam bidang sosial-politik, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan merusak keamanan sampai ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat maka mantan tahanan politik dilarang berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dikarenakan Orde Baru menganggap instrumen ideologis dapat menjadi lawan dari ISA yang mereka miliki, maka pelarangan mantan tahanan politik untuk berpartisipasi dalam ranah ideologis dapat dipahami.

Orde Baru sering melakukan propaganda dengan memberikan arti buruk pada kata yang biasa dinilai positif untuk melakukan *framing* atau penafsiran negatif terhadap oposisi. Hal ini dapat ditemukan dalam kutipan di bawah ini.

Mereka ingin mencari bukti bahwa Kinan dan kawan-kawan adalah *dalang* unjuk rasa itu. Kata *dalang* menjadi buruk selama sepuluh tahun terakhir karena tidak lagi merujuk pada seni pertunjukan wayang (Chudori, 2017, p. 75).

Penggunaan istilah itu sarat kepentingan hegemonik. Kata *PKI* yang dirangkai dengan garis miring pada *G30S* adalah salah satu contoh penafsiran tunggal Orde Baru (Ashri & Syahwal, 2023). Dengan melakukan hal itu, Orde Baru ingin menunjukkan bahwa kelompok yang ada dibalik Peristiwa Gerakan 30

September adalah PKI. Propaganda ini adalah salah satu ISA yang merupakan doktrin yang ditanamkan ke dalam pikiran masyarakat.

Media massa yang bertugas untuk menjadi katrol dalam sebuah pemerintahan tidak berfungsi dengan baik di zaman Orde Baru dalam *Laut Bercerita*. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut.

Menteri Penerangan biasanya dengan gaya teatrikalnya menyindir media-media yang tak patuh padanya. Yang paling sering kena sindir adalah majalah *Tera*, *Harian Jakarta*, dan *Harian Demokrasi* karena mempekerjakan tapol dan anak tapol (Chudori, 2017, p. 60).

Bahasa hukum yang digunakan untuk memutuskan golongan yang tertuduh Gerakan 30 September sangat lentur (Ashri & Syahwal, 2023). Pasal karet ini membuat Kopkamtib memiliki kuasa penuh dalam melakukan aksinya. Kopkamtib dapat menangkap dan memenjarakan siapa pun yang dianggap sebagai tahanan politik yang berafiliasi dengan PKI. Tanpa dasar hukum yang jelas, orang yang ditangkap pada kenyataannya adalah penduduk biasa yang dituding memiliki hubungan dengan gerakan komunis (Ashri & Syahwal, 2023).

Soeharto mengatur media massa untuk memiliki fungsi ganda (Hadi & Kasuma, 2012). Fungsi yang pertama adalah sebagai industri untuk mendongkrak investasi. Fungsi selanjutnya adalah sebagai rekan pemerintah. Doktrin *Bebas Bertanggung Jawab* adalah salah satu hegemoni pemerintah Orde Baru atas media massa. Media massa harus bertanggung jawab kepada pemerintah dan bukan kepada masyarakat (Suwirta, 2018). Pers dan media massa digunakan untuk mewakili suara dari penguasa (Eddyono, 2021).

Orde Baru dalam *Laut Bercerita* menggunakan RSA untuk menekan masyarakat. Dominasi terhadap kelas bawah ini dapat dilihat melalui kutipan berikut.

Lahan pertanian rakyat Desa Blangguan digusur secara paksa karena daerah kediaman dan lahan mereka akan digunakan untuk latihan gabungan tentara dengan menggunakan mortar dan senapan panjang (Chudori, 2017, p. 94).

Farchan (2022) menemukan bahwa Orde Baru memulai dominasi militer dengan cara menyingkirkan kelompok komunis secara sistematis. Tanah-tanah di desa yang dimiliki basis petani komunis direbut dan diduduki oleh militer. Berikutnya, tanah-tanah ini dijadikan pangkalan militer (Farchan, 2022). Tindakan ini adalah sikap Orde Baru yang ingin menunjukkan perubahan relasi kekuasaan, menundukkan aktor sipil yang diwakili oleh petani dan buruh di bawah dominasi militer.

## 2. Instrumen Kontra Hegemoni

Mahasiswa sebagai aktor intelektual dibuktikan dengan beberapa kutipan berikut.

“Kita bebas mendiskusikan buku siapa saja, apakah karya Laclau, Miliband, Ben Anderson, atau bahkan novel Pak Pramoedya akan menghirup udara merdeka di sini” (Chudori, 2017, p. 16).

“Salah satu tujuan diskusi dan kelas-kelas pemikiran politik dan filsafat yang diadakan di Rumah Hantu Seyegan, dan sebelumnya di Palembang adalah agar mereka membaca dan mendiskusikan bacaan alternatif” (Chudori, 2017, p. 39).

“Diskusi-diskusi itu perlu agar kami semua bisa belajar dengan kritis. Kita tak bisa menelan informasi yang dilontarkan pemerintah. Mereka bikin sejarah sendiri, kami mencari tahu kebenaran” (Chudori, 2017, p. 62).

“Indonesia membutuhkan kelas menengah yang melek politik dan aktivis yang tak lelah menuntut. Untuk itu kita harus melihat perlawanan mahasiswa pada peristiwa Kwangju” (Chudori, 2017, p. 92).

Diskusi tentang sastra yang dilarang ini adalah cara mahasiswa untuk mendapatkan akses kepada sejarah alternatif. Perlu diketahui bahwa sejarah yang selama ini diajarkan di institusi pendidikan adalah rangkuman pemikiran pemerintah yang berkuasa. Tentu saja, segala sesuatu yang memberi kesan jelek terhadap pemerintahan tidak akan diajarkan di dalam sekolah. Oleh sebab itu, mahasiswa bisa mendapatkan asupan pengetahuan itu melalui diskusi yang berada di luar kampus dengan bacaan yang tidak sesuai dengan kurikulum.

Buku-buku yang didiskusikan oleh kelompok Winatra contohnya adalah karya Laclau, Ben Anderson atau Pramoedya Ananta Toer. Pemilihan tokoh yang disebutkan oleh Chudori sebagai bacaan dari kelompok Winatra dapat ditelusuri sebagai pandangan ideologis Chudori dalam karya yang ia lahirkan. Pramoedya Ananta Toer adalah anggota Lekra yang memiliki pemahaman sosialis, itulah alasan kenapa kelompok ini dicurigai memiliki paham sosialis karena nama Winatra berarti membagi dengan setara. Pak Pram dikenal mempelajari tentang penyiksaan keturunan Cina di Indonesia dan menolak Indonesia yang Jawasentris, hal yang cukup bagi Orde Baru untuk memasukkannya ke daftar komunis.

Penulis lain yang disebutkan adalah Laclau. Laclau adalah seorang filsuf Argentina yang menerbitkan buku berjudul *Hegemony and Socialist Strategy* bersama Chantal Mouffe. Tulisan Laclau membahas mengenai dominasi kaum penguasa atau borjuasi terhadap kaum proletar sesuai dengan definisi Karl Marx dalam *Manifesto Komunis*. Penulis lainnya adalah Ben Anderson atau yang dikenal dengan Indonesianis atau pakar tentang Indonesia. Ben adalah orang pertama yang mempertanyakan G30S versi Soeharto.

Penulis lainnya yang disebutkan di dalam buku adalah Ralph Miliband, seorang sosiolog yang berasal dari Inggris. Miliband memiliki teori bahwa negara berfungsi untuk melayani keinginan atau kebutuhan kapitalis. Teori atau tokoh yang disebutkan di dalam novel *Laut Bercerita* setelah diteliti lagi memiliki kesamaan atau benang merah terkait perlawanan terhadap penindasan. Topik ini yang diselipkan oleh Chudori sebagai bagian dari ideologi kontra-hegemoni yang coba ia promosikan.

Mahasiswa sebagai aktor intelektual kembali dibuktikan lewat kutipan di bawah ini.

Itu pula yang mendorong dia memutuskan memilih Fakultas Politik untuk melahap semua teori politik ekonomi yang barangkali bisa menemukan jawaban atas problem besar dalam situasi sosial ekonomi (Chudori, 2017, p. 19).

Flynn (2021) menyatakan bahwa sebuah dominasi bisa dilawan melalui edukasi. Pengajaran kontra-hegemoni dapat menjadi acuan bahwa sebuah negara memiliki kebebasan dalam demokrasi. Flynn (2021) menemukan bahwa edukasi melawan definisi yang dibuat oleh kelompok dominan. Dengan membuka cakrawala pengetahuan, edukasi akan membuat manusia menyadari bahwa ia hidup dalam tipu daya kelas dominan.

Pemerintah menggunakan ISA dalam bentuk propaganda yang menyatakan bahwa setiap individu yang kedapatan membawa buku yang terlarang akan dianggap sebagai pengkhianat terhadap negara. Hal ini dibuktikan melalui kutipan di bawah ini.

“Karena peristiwa penangkapan para aktivis masih saja menggelayuti Yogyakarta, membawa-bawa fotokopi buku karya Pramoedya Ananta Toer sama saja dengan menenteng bom: kami akan dianggap berbahaya dan pengkhianat bangsa” (Chudori, 2017, p. 19).

Kutipan di atas menunjukkan keberpihakan Chudori di dalam *Laut Bercerita*. Chudori melakukan kritik kepada pemerintah yang menyamakan karya sastra dengan sebuah bom dan pembacanya sebagai teroris. Sebagai seorang penulis yang ingin dihargai karyanya, Chudori dapat dipastikan berperan sebagai oposisi dari pemerintahan yang melakukan kriminalisasi terhadap karya sastra. Dengan kriminalisasi terhadap buku sebagai sumber informasi, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan otoriter ingin memelihara kebodohan supaya gampang menyebarkan ketakutan, doktrin dan propaganda.

Gramsci (1992) mengemukakan bahwa mahasiswa dianggap sebagai intelektual organik yang memiliki peran penting dalam melawan ISA yang diterapkan oleh penguasa. Hal ini dibuktikan oleh beberapa kutipan berikut.

Apakah kita akan terus-menerus membiarkan rezim Soeharto berkuasa selama-lamanya atau apakah aku ingin berbuat sesuatu? (Chudori, 2017, p. 22).

“Kita tak ingin selama-lamanya berada di bawah pemerintahan satu orang selama puluhan tahun. Hanya di negara diktatorial satu orang bisa memerintah begitu lama ... Kita harus mengguncang mereka, masyarakat yang pasif, malas dan putus asa agar mereka mau ikut memperbaiki negeri yang korup dan berantakan ini, yang sangat tidak menghargai kemanusiaan ini, Laut” (Chudori, 2017, p. 145).

“Mereka mungkin masih diam, tetapi tokoh-tokoh oposisi akan muncul. Sementara kita tetap menyalakan isu-isu penting di kampus maupun luar kampus” (Chudori, 2017, p. 146).

Sebagai bagian dari kaum intelektual, mahasiswa hadir mewarnai pergolakan politik yang ada di Indonesia (Widyanti et al., 2023). Kutipan di atas menunjukkan bahwa *organic intellectuals* adalah kelompok kelas menengah yang berpihak pada kepentingan masyarakat *subaltern*. Mahasiswa akan mewakili suara dari masyarakat yang ditindas oleh hegemoni penguasa. Bukti terbaru adalah Peristiwa Soeharto Lengser sebagai bukti pergolakan politik yang diwarnai oleh mahasiswa.

Althusser (1971) menemukan bahwa pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa akan berperan sebagai resistensi terhadap hegemoni. Hal ini dibuktikan melalui beberapa kutipan berikut.

Gerakan Mahasiswa Winatra sudah dideklarasikan secara serentak di beberapa kota. Kaki rasanya gatal jika kami hanya berdiskusi sepanjang abad tanpa melakukan tindakan apa pun (Chudori, 2017, p. 14).

“Kami mendampingi mereka yang bertahan, ikut membantu membangun kelas darurat untuk anak-anak dan rakit untuk transportasi” (Chudori, 2017, p. 23).

“Di kampus kita hanya belajar disiplin berpikir, tetapi pengalaman yang memberi daya dalam hidup adalah di lapangan” (Chudori, 2017, p. 29).

“Aku tak bisa diam saja melihat keadaan seperti ini. Kita harus selalu mencoba berbuat sesuatu, menyalakan sesuatu, sekecil apa pun dalam kegelapan di negeri ini” (Chudori, 2017, p. 31).

“Tetapi suatu saat kita harus bergerak. Tak cukup hanya sibuk berduel kalimat di sini. Kita adalah generasi yang harus bergerak, bukan hanya mendiskusikan undang-undang yang mengekang kita selama puluhan tahun di bawah tekanan satu jempol” (Chudori, 2017, p. 40).

Gerakan kami semua bermodalkan semangat, uang pribadi, dan sumbangan beberapa individu yang secara diam-diam sudah muak dengan pemerintahan Orde Baru yang semakin represif dari tahun ke tahun (Chudori, 2017, p. 94).

*Traditional intellectuals* contohnya guru atau dosen dalam institusi pendidikan umum akan mengajarkan ideologi penguasa (Althusser, 1971). Fungsi yang dijalankan oleh *traditional intellectuals* adalah untuk menyebarkan ISA dan melanggengkan hegemoni. Kehadiran mahasiswa dianggap sebagai *disrupting force* atau pengganggu dari *equilibrium* atau *status quo* yang sudah dicapai penguasa. Sentimen terhadap mahasiswa atau aktor intelektual lain adalah alasan kejatannya Orde Baru terhadap oposisi ideologis.

### 3. Tujuan akhir pemikiran perlawanan Chudori

Secara ideologis, Chudori adalah oposisi dari rezim Orde Baru dan segala bentuk penindasan yang mengikutinya. Menurut Chudori perjuangan melawan hegemoni belum berakhir dan harus terus diperjuangkan, hal ini dapat ditemukan melalui kutipan di bawah ini.

Bangsa yang begitu banyak masalah dan yang mengira segalanya sudah beres setelah 21 Mei 1998 (Chudori, 2017, p. 214).

Faktanya, Tim Gabungan Pencari Fakta dibentuk untuk mencari kebenaran terkait Tragedi Mei 1998. Sejarah mencatat, tidak pernah ada titik terang dari kasus ini. Laporan TGPF ditolak oleh elit militer, diabaikan oleh pemerintah dan dilawan oleh media nasional (Purdey, 2002). Peristiwa ini menguap begitu saja tanpa ada pengambilan tindakan lebih lanjut dan hanya menjadi noda yang tidak akan hilang dari sejarah Indonesia. Hasil dari kerusuhan Mei 1998 adalah pengumuman pengunduran diri Soeharto setelah menjabat 32 tahun.

Perjuangan yang harus dilakukan menurut sudut pandang korban adalah berjuang untuk melanjutkan hidup setelah kepergian dari korban. Hal ini dibuktikan melalui kutipan di bawah ini.

“Peristiwa yang tak nyaman atau menyakitkan tidak perlu dihapus tetapi harus diatasi” (Chudori, 2017, p. 250).

“Yang penting adalah: kekejian mereka harus ada ganjarannya secara hukum, tak cukup hanya dipecat dari militer belaka. Ini persoalan nyawa” (Chudori, 2017, p. 273).

Kutipan di atas menunjukkan bagaimana sudut pandang keluarga memandang penyelesaian kasus ini. Hal pertama yang harusnya dilakukan oleh negara sesuai Standar HAM Internasional adalah dengan permintaan maaf secara publik yang disebut sebagai reparasi emosional efektif. Negara dituntut untuk mengakui kesalahan, mengungkap kebenaran dan meluruskan sejarah. Permintaan maaf harus sejalan dengan penyelesaian kasus HAM berat agar tidak terjadi pengulangan di masa depan (Putri et al., 2023).

Ashri (2021) menemukan bahwa Pasal 24 (2) ICPPED 2006 mengatur tentang hak atas kebenaran. Pasal ini diakui oleh HAM Internasional sebagai hak yang mengatur mengenai kasus penghilangan paksa. Korban berhak mengetahui keadaan, kemajuan investigasi dan nasib orang yang dihilangkan paksa. Negara bertanggung jawab untuk melakukan investigasi berkelanjutan hingga nasib maupun keberadaan korban dapat diklarifikasi (Ashri et al., 2021).

#### D. Penutup

Leila Salikha Chudori adalah salah satu aktor intelektual organik menurut definisi Gramsci. Ia hadir melalui tulisan dan wawancara untuk menyadarkan masyarakat dari ISA yang belakangan mulai menyebar. Romantisasi terhadap Orde Baru dan propaganda *Penak Jamanku Toh* adalah bukti bahwa masyarakat perlu diingatkan terhadap doktrin yang perlahan-lahan menyusup dalam alam bawah sadar masyarakat. Hegemoni dan kontra-hegemoni merupakan negosiasi yang didasari oleh persetujuan, Chudori tidak ingin masyarakat menyetujui secara sadar sebuah hegemoni dan mengulang kembali resistensi yang sudah terjadi di tahun 1998.

*Laut Bercerita* adalah sebuah karya sastra yang memilih untuk berada di dalam jalur sastra diskursif. Dapat disimpulkan bahwa *Laut Bercerita* adalah salah satu perjuangan Chudori sebagai aktor intelektual. Meski bukan mahasiswa, Chudori adalah aktor intelektual yang bergerak melalui media massa dan media cetak. Wawancara dan tulisan-tulisannya baik sebagai jurnalis maupun sebagai penulis telah terbukti berdiri sebagai instrumen kontra-hegemoni. Partisipasi Chudori di setiap Kamisan adalah salah satu bukti bahwa ia merupakan aktor intelektual yang berpihak kepada *subaltern forces* atau kelompok tertindas.

#### Daftar Pustaka

- Adi, Y. A., & Bahri, M. T. (2023). Conflict and Perspectives: The Social Construction of Chinese Ethnic Citizens against Natives in Surakarta, Indonesia after the May 1998 Riots. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1), 15–30. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i1.278>
- Althusser, L. (1971). *Lenin and Philosophy*. Monthly Review Press.
- Andani, N. S., Raharjo, R. P., & Indarti, T. (2022). Kritik Sosial Dan Nilai Moral Individu Tokoh Utama Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(1), 21–32. <https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.7832>
- Ashri, M., & Syahwal, S. (2023). Potret Hukum Diskriminatif Orde Baru: Tinjauan Hukum dan Politik Atas Diskriminasi terhadap Eks Tahanan Politik PKI. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(2), 221–243. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.1070>
- Ashri, M., Magassing, M., & Sakharina, I. K. (2021). Hak atas Kebenaran Bagi Korban Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-1998. *Jurnal Jentera*, 4(2), 495–514. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/37>
- Bird, J. (1999). Indonesia in 1998: The Pot Boils Over. *Asian Survey*, 39(1), 27–37. <https://doi.org/10.2307/2645591>
- Cere, R. (2016). Hegemony and Counter-Hegemony in Postcolonial Media Theory and Culture. In K. Merten & L. Krämer (Eds.), *Post-Colonial Studies meets Media Studies: A Critical Encounter* (pp. 125–142). The Deutsche Nationalbibliothek. <https://doi.org/10.14361/9783839432945-007>
- Chudori, L. S. (2017). *Laut Bercerita*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Chudori, L. S. (2020). 74. *Dari Perspektif Leila Chudori tentang Tragedi Mei 98 dan Novel Laut Bercerita*. Menjadi Manusia. <https://www.youtube.com/watch?v=MYSMXknVKMo>
- Cribb, R. (2010). The Historical Roots of Indonesia's New Order: Beyond the Colonial Comparison. In E. Aspinall & G. Fealy (Eds.), *Soeharto's New Order and its Legacy: Essays in honour of Harold Crouch* (1st ed., pp. 67–80). ANU ePress. <https://doi.org/10.22459/SNOL.08.2010.05>

- Eddyono, A. S. (2021). Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam. *Komunika*, 8(1), 53–60. <https://doi.org/10.22236/komunika.v8i1.5672>
- Eyerman, R. (2003). *Cultural Trauma*. Cambridge University Press.
- Farchan, Y. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152–161. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>
- Flynn, S. (2021). Revisiting Hegemony: A Gramscian Analysis for Contemporary Social Work. *Irish Journal of Sociology*, 29(1), 77–96. <https://doi.org/10.1177/0791603519884201>
- Furqan, R. A., Arbain, A., & Putri, S. M. (2023). Genosida dan Trauma dalam Novel Laut Bercerita. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 11(1), 17–26. <https://doi.org/10.24036/jbs.v11i1.119834>
- Gramsci, A. (1992). *Prison Notebooks*. International Publishers.
- Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Verleden*, 1(1), 40–50. [https://journal.unair.ac.id/filerPDF/4\\_jurnal\\_propaganda\\_dwiwahyohadi.pdf](https://journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal_propaganda_dwiwahyohadi.pdf)
- Hancock, B., Ockleford, E., & Windridge, K. (2009). *An Introduction to Qualitative Research*. The NIHR RDS for the East Midlands / Yorkshire & the Humber. <https://oysconmelibrary01.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/09/introduction-to-qualitative-research-20091.pdf>
- Hara, A. E. (2001). The Difficult Journey of Democratization in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 23(2), 307–326. [https://doi.org/10.1355/cs23\\_2g](https://doi.org/10.1355/cs23_2g)
- Himawan, E. M., Pohlman, A., & Louis, W. (2022). Revisiting the May 1998 Riots in Indonesia: Civilians and Their Untold Memories. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(2), 240–257. <https://doi.org/10.1177/18681034221084320>
- Iryana, W., & Mustofa, M. B. (2023). May 1998 Mass Riots in Jakarta: A Holistic and Contextual Analysis of Critical Political Communication. *Paramita*, 33(2), 201–211. <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i2.38022>
- Liddle, R. W. (1985). Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institutions. *Pacific Affairs*, 58(1), 68–90. <https://doi.org/10.2307/2758010>
- Liddle, R. W., & Mallarangeng, R. (1997). Indonesia in 1996: Pressures from Above and Below. *Asian Survey*, 37(2), 167–174. <https://doi.org/10.2307/2645484>
- Marx, K. (1904). *A Contribution to the Critique of Political Economy* (2nd ed.). C. H. Kerr.
- Nordholt, H. S. (2003). Renegotiating Boundaries, Access, Agency and Identity in Post-Soeharto Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 159(4), 550–589. <https://www.researchgate.net/publication/254768284>
- Nugroho, D. A., Muslikh, & Andriyanto. (2022). Keterlibatan Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Surakarta pada Peristiwa Reformasi 1998 di Kota Solo. *Jurnal Siginjai*, 2(2), 45–55. <https://doi.org/10.22437/js.v2i2.21536>
- Patria, N. (2020). 79. *Dari Perspektif Nezar Patria Tentang Penculikan Aktivis 1998*. Menjadi Manusia.
- Purdey, J. (2002). Problematizing the Place of Victims in Reformasi Indonesia: A Contested Truth about the May 1998 Violence. *Asian Survey*, 42(4), 605–622. <https://doi.org/10.1525/as.2002.42.4.605>
- Putri, M. K. A., Ashri, A. M., Harmer, C. I. F., Gusnawati, D., & Saputri, W. (2023). Permintaan Maaf Negara Atas Pelanggaran HAM yang Berat sebagai Bentuk Reparasi Korban. *Justitia et Pax*, 38(2), 429–465. <https://doi.org/10.24002/jep.v38i2.6586>
- Rahmadhani, A. F., & Wardana, D. J. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2799–2807. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1056>
- Rahmi, Y. (2021). Representasi Kekerasan dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*, 11(2), 194–204. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v11i2.11730>
- Rajab, B. (2022). Otoritarianisme-birokratik Orde Baru, Krisis Ekonomi dan Politik, dan Demokrasi Formal Masa Reformasi. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(1), 59–78. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>

- Solihutaufa, E. (2022). Pers dalam Demokratisasi di Indonesia: Kajian tentang Peranan Pers dalam Peristiwa Revolusi Mei 1998. *Jurnal Dialektika Politik*, 6(2), 152–174. <https://doi.org/10.37949/jdp.v6i2.17>
- Suryadinata, L. (2007). The Decline of the Hegemonic Party System in Indonesia: Golkar After the Fall of Soeharto. *Contemporary Southeast Asia*, 29(2), 333–358. <https://doi.org/10.1355/cs29-2f>
- Suwirta, A. (2018). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, 1966-1974. *Mimbar Pendidikan*, 3(2), 113–136. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v3i2.13949>
- Widyanti, R. H. D., Fauzi, I. A., & Prasetya, Y. B. (2023). Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978: Dari Malari sampai NKK/BKK. *Chronologia*, 4(3), 140–153. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jhe/article/view/11426>

